

## **ABSTRAK**

Hukuman kebiri adalah sanksi dengan pemasangan alat elektronik berupa gelang elektronik atau lainnya yang sejenis, pada pelaku pelecehan seksual anak, yang mengakibatkan hilangnya gairah seksual. Hukuman kebiri masih menimbulkan banyak kontroversi didalam penerapannya di Indonesia karena dianggap melanggar prinsip prinsip Hak Asasi Manusia. Hukuman kebiri dapat menimbulkan dampak buruk bagi tubuh manusia. Indonesia Merupakan negara hukum. Negara hukum sangat berkaitan dengan Hak asasi manusia. Hukuman kebiri dianggap melanggar hak asasi manusia bagi beberapa kalangan. Karena hukuman kebiri dapat berdampak buruk bagi kesehatan seseorang dalam melangsungkan hidup dan berkeluarga. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri itu sendiri karna dianggap tidak sesuai dengan prinsip medis dan melanggar kode etik kedokteran. Hukuman kebiri juga dianggap melanggar hak asasi manusia dalam hal, Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, yang merendahkan derajat dan martabatnya kemanusiaannya dan juga hak untuk melanjutkan keturunan. Maka dari itu, tulisan ini dibuat untuk menganalisis secara hukum kebiri kimia di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan penulis menganalisa tentang pengaturan hukuman kebiri dalam perspektif hak asasi manusia menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis bagaimana kemudian hukuman kebiri dalam perspektif hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pelecehan Seksual, Hukuman Kebiri.

## **ABSTRACT**

The castration penalty is a sanction involving the installation of an electronic device in the form of an electronic bracelet or something similar, to the perpetrator of child sexual abuse, which results in loss of sexual desire. The castration penalty still causes a lot of controversy in its application in Indonesia because it is considered to violate human rights principles. Castration can have negative effects on the human body. Indonesia is a rule of law country. The rule of law is closely related to human rights. The castration penalty is considered to violate human rights in some circles. Because castration can have a negative impact on a person's health in maintaining a life and raising a family. Even the Indonesian Doctors Association (IDI) was appointed as the executor of the castration sentence because it was deemed not in accordance with medical principles and violated the medical code of ethics. The castration penalty is also considered to violate human rights in terms of, the right to be free from torture, punishment or cruel, inhumane treatment that degrades the level and dignity of one's humanity and also the right to continue offspring. Therefore, this article was written to legally analyze chemical castration in Indonesia from a human rights perspective. This research is normative juridical research because the author analyzes the regulation of castration punishment from a human rights perspective according to Law no. 39 of 1999. In this research, the author uses a normative juridical method to analyze what the castration punishment looks like from a human rights perspective.

Keywords: Human Rights, Sexual Harassment, Castration Punishment